

Judul : Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rp 1,6 Miliar
Tanggal : Jumat, 21 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rp 1,6 Miliar

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah dimulai tahun 2025. Saat ini, sudah ada 80 ribu koperasi yang sudah dibentuk.

Nantinya, kata Prabowo, seluruh Kopdes akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa menunjang kelancaran aktivitas koperasi seperti pendingin, gudang dan lainnya. "Dan pada akhir 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang yang akan memiliki cold storage," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). Selasa kemarin (18/11/2025),

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota disela-sela rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, memberikan kebutuhan anggaran pembangunan satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mencapai Rp 1,6 miliar.

"Satu gedung KDKMP ini kita menganggarkan Rp 1.658.000.000 atau kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia," kata Joao.

Ia menyampaikan, perhitungan biaya pembangunan dilakukan dengan mempertimbangan kondisi

geografis berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, desain harga pembangunan Kopdes ini sangat rasional dan wajar.

Anggaran pembangunan yang mencapai miliaran tersebut mendapatkan pro kontra di masyarakat. Bahkan, di DPR, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Almah Nurul Anam menilai rancangan bangunan senilai Rp 1,6 miliar untuk satu gedung Kopdes Merah Putih terlalu mewah.

"Saya melihat, mengamati tentang konsep total ruang yang dibuat terlalu mewah bagi saya kalau untuk tingkat desa, apalagi wujud

yang ingin kita lakukan itu adalah koperasi," kata Mufti.

Ia meminta agar desain bangunan dipangkas menjadi lebih sederhana agar efisiensi anggaran tercapai. "Nah daripada anggaran itu Rp 1,6 miliar, mendingan Bapak buat budget Rp 500 juta, target pencapaiannya bisa lebih maksimal, konsepnya lebih diminimalis, jangan terlalu sebesar ini," tegasnya.

Pandangan yang sama diungkapkan Manager Seknas (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Fitra, Badiul Hadi. Ia menganggap anggaran 1,6 miliar masih terlalu mahal.

Ia pun mendesak agar anggaran tersebut dipangkas agar lebih murah dan hemat. "Anggaran bisa ditekan lewat desain modular," ujar Badiul.

Apakah tudingan terlalu mahal dan mewah? Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menilai anggaran yang diusulkan sudah sangat wajar. "Saya kira kalau fasilitasnya klinik, kurang, gerai sangat rasional," katanya.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Herman Khaeron dan Badiul Hadi terkait polemik anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp 1,6 miliar per unit, berikut wawancaranya.

BADIUL HADI, Manager Seknas Fitra

Harusnya Anggaran Masih Bisa Dipangkas



“

Saat ini, fakta bahwa banyak Kopdes belum memiliki usaha yang berjalan secara optimal menambah kekhawatiran efektivitas investasi ini.

Kemarin, ada usulan pembangunan Kopdes Merah Putih anggaran sebesar 1,6 miliar. Apa tanggapan Anda?

Anggaran Rp 1,6 miliar per unit Kopdes menjadi sangat memperhaluskan ketika dikaitkan dengan jumlah koperasi desa/kelurahan yang sudah mencapai sekitar 8.000 unit (data Setkab 2025).

Jika semua koperasi tersebut dibangun dengan skema fisik serupa, total anggaran bisa mencapai sekitar Rp 12,8 triliun (Rp 1,6 miliar x 8000). Triliunan rupiah yang menimbulkan risiko pemborosan anggaran publik apabila tidak didukung perencanaan matang.

Mengakuisikan dana besar tanpa analisis mendalam tentang kebutuhan lokal dan potensi bisnis koperasi

bisa berarti membangun/menyuburkan monumen koperasi. Bangunan megah tanpa fungsi produktif yang nyata, hanya menjadi beban keuangan negara.

Kemarin Anda masih pesimis?
Saat ini, fakta bahwa banyak Kopdes belum memiliki usaha yang berjalan secara optimal menambah kekhawatiran efektivitas investasi ini.

Tanpa unit bisnis yang hidup, misalnya usaha ritel desa, simpan pinjam, UMKM, atau gudang, gedung koperasi hanya menjadi gedung kosong atau ruang administrasi yang minim manfaat.

Apakah dalam pembangunan

Kopdes perlu transparan?

Betul. Transparansi dan akuntabilitas menjadi keniscayaan. Karena tanpa transparansi skema pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Kopdes membuka celah potensi korupsi.

Terlebih jika tidak diawasi dengan transparan dan profesional, misalnya melalui audit berkala, keterlibatan masyarakat desa, dan sistem *e-procurement*, pembangunan Kopdes bisa menjadi ladang korupsi berskala luas.

Menurut Anda, apakah biaya pembangunan Kopdes sebesar 1,6 miliar bisa ditekan?

Anggaran bisa ditekan lewat desain modular, prioritas fungsi esensial, dan *procurement* yang kompetitif dan transparan. ■ REN

HERMAN KHAERON, Anggota Komisi VI DPR

Anggarannya Masih Wajar Dan Rasional



“

Kopdes ini sudah menjadi program negara, program utama dari Pemerintahan, maka kami dorong dan bantu untuk sukseskannya.

Apa respons dan tanggapan Anda terkait rencana Pemerintah yang akan membangun Kopdes Merah Putih dengan biaya mencapai 1,6 miliar per unit?

Dengan rencana untuk membangun gudang dan fasilitas kantor Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan Indonesia yang kurang lebih 80 ribu koperasi, tentu kalau itu sudah menjadi pengusahan negara ya tinggal dijamin.

Cuma yang harus dipikirkan adalah bagaimana sumber dananya. Jika sumber dana itu APBN dan sifatnya adalah biaya untuk pembangunan, saya kira nggak ada masalah karena itu tidak menjadi beban pengembalian. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai penyertaan modal yang seluruh modalnya

adalah komersial atau seluruh modalnya berdasarkan pinjaman, maka harus dihitung ulang, karena jangan sampai menjadi beban hutang bagi Kopdes Merah Putih yang bersangkutan.

Soal anggaran 1,6 miliar untuk pembangunan, bagaimana?

Kalau besaran pembangunannya gedung, saya kira ada kerosionalitasan pembangunan. Per meternya katanya 2,5 sampai 2,6 juta. saya kira make sense lah ya. Tinggal nanti sistem pengawasannya seperti apa.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan anggaran 1,6 miliar untuk pembangunan Kopdes terlalu mahal?

Ya, kalau itu silakan berbeda pen-

dapat. Tapi, bisa saja anggaran pembangunan sebesar 1,6 miliar dengan fasilitas yang lebih baik, lebih bagus, kemudian sarana penunjangnya lebih memadai.

Apalagi di Kopdes tersebut juga akan dibangun klinik kesehatan, ada gudang, ada gerai. Kalau semuanya dengan interornya, nilai segitu saya kira rasional lah.

Dan tinggal justru bagaimana kita menghitung keekonomisannya. Itu yang penting.

Kalau pengawasannya seperti itu menurut saya salahkan saja. Karena Kopdes ini sudah menjadi program negara, program utama dari Pemerintahan Presiden Prabowo, yang kami mendorong dan membantu untuk sukseskan. ■ REN